

**TRANSFORMASI RELASI SOSIAL MENJADI
JALUR EKSPLOITASI EKONOMI
DI ERA NEOLIBERAL**

ORASI ILMIAH
Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada



Pada Peringatan Dies Natalis Ke-51
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara



**MEDAN
24 AGUSTUS 2016**

TRANSFORMASI RELASI SOSIAL MENJADI JALUR EKSPLOITASI EKONOMI DI ERA NEOLIBERAL

Pujo Semedi

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Para Guru Besar, Inang, Amang, Ito, Abang yang saya hormati. Selamat pagi, assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh, horas. Terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Budaya USU, yang telah memberi saya kesempatan tampil di mimbar akademik yang mulia ini. Ibu Bapak sekalian, saya mohon perkenan untuk menyampaikan orasi ini.

Dalam empat dekade terakhir, masyarakat Indonesia mengalami peningkatan penghidupan ekonomi yang sangat pesat. Kita berubah dari bangsa miskin dengan produksi per kapita di bawah 300 dolar Amerika Serikat pada awal 1980an menjadi bangsa menengah dengan GDP/kapita 3.346 dolar Amerika pada tahun 2015.

Tabel 1. GDP/ Kapita Indonesia 2000-2015

Tahun	GDP/Kapita (dollar A.S.)	Tahun	GDP/Kapita (dollar A.S.)
2000	780.1	2008	2,167.90
2001	748.2	2009	2,262.70
2002	900.1	2010	3,125.20
2003	1,065.70	2011	3,647.60
2004	1,150.30	2012	3,700.50
2005	1,263.50	2013	3,631.70
2006	1,590.20	2014	3,499.60
2007	1,860.60	2015	3,346.50

Sumber: Bank Dunia

Dalam kehidupan sehari-hari kenaikan penghidupan ekonomi ini tampak jelas dari peningkatan kondisi perumahan; makin banyak rumah bata berjendela jendela yang kering dan terang; dari pertambahan jumlah kendaraan di jalan raya, sehingga kemacetan lalu lintas terjadi hampir di

setiap sudut kota; dari kian padatnya jalur penerbangan sehingga Medan membangun bandar udara baru di Kualanamu guna menggantikan Polonia. Saat saya mahasiswa dulu, kampus UGM penuh dengan sepeda; mahasiswa dan dosen naik sepeda; di Fakultas Sastra hanya dosen yang agak makmur karena punya banyak warisan sawah mampu naik sepeda motor; dan hanya dua dosen yang banyak proyeknya yang naik mobil. Sekarang kampus UGM penuh sesak dengan mobil parkir: “Ini kampus tempat orang belajar atau pasar mobil bekas pakai?” demikian sebagian mahasiswa melayangkan protes. Peningkatan kehidupan ekonomi ini juga terlihat dari perubahan penilaian kita terhadap tubuh. Dahulu waktu saya kecil, anak gemuk dinilai sebagai anak yang sehat, lucu dan menggemirakan. Sekarang kita ribut dengan perkara mengatur asupan makanan, diat, diet untuk menurunkan berat tubuh dan menilai tubuh yang tambun sebagai biang persoalan ... yang kolesterol-lah, yang darah tinggi-lah; yang asam urat-lah. Kata kawan saya yang penganut *Kawruh Untung*: “Untung asam urat ... bukan asam urat.”

Sejalan dengan peningkatan produktivitas ekonomi, kehidupan politik masyarakat Indonesia juga semakin demokratis. Indeks demokrasi yang disusun oleh mingguan *The Economist* menampilkan pada tahun 2006 ID Indonesia ada pada angka 6.41 yang terus meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai 7.03 untuk tahun 2015. Indeks kualitas proses pemilihan umum dan pluralisme; kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik dan budaya politik ini menempatkan Indonesia tahun 2015 pada ranking 49 (dari 147 negara) dunia, mengungguli Filipina di urutan 54, Malaysia 68, Singapura 74, Thailand 98, Kamboja 113, Myanmar 114, dan Vietnam 128.

Tabel 2. Indeks Demokrasi Indonesia, 2006-2015

Tahun	Indeks Demokrasi
2006	6.41
2008	6.34
2010	6.53
2011	6.53
2012	6.76
2013	6.82
2014	6.95

Dibanding dengan tahun 1970-1990, saat kepemimpinan Presiden Suharto kehidupan politik Indonesia saat ini kian leluasa. Tidak lagi orang takut omong sedikit dipanggil Kamtib, omong itu dipanggil Laksus, dua badan keamanan non-konstitusional yang sekarang sudah dibubarkan. Orang makin bebas menyampaikan pandangan dan aspirasi. Hidup makin tenang, tidak was-was karena diawasi terus menerus oleh, meminjam istilah George Orwell, the *Big Brother*, Abang Besar. Sebagai warga negeri, kita sekarang merasa kehidupan yang kian merdeka.

Sejalan dengan peningkatan ekonomi dan demokrasi, kita menyaksikan persoalan kehidupan Indonesia saat ini mulai beranjak dari persoalan kemiskinan menjadi persoalan kemakmuran. Persoalan transportasi kita sekarang bukan lagi tidak bisa pergi karena tidak ada kendaraan, melainkan karena jalannya macet penuh kendaraan. Sakitnya penduduk Indonesia sekarang, bukan lagi karena diserang *honger oedem*, busung lapar; tetapi kegemukan dan obesitas akibat salah makan. Iya salah, karena mestinya tidak dimakan sebab tidak lagi diperlukan oleh tubuh tetap saja dimasukkan mulut, dikunyah-kunyah dan ditelan. Dulu pengemis saat bekerja memakai baju usang penuh tambalan. Sekarang pengemis yang keluar masuk kampung kian jarang; dan beberapa tahun silam mungkin untuk mengenang jaman miskin di Jogja sempat ada model pakaian yang dibikin dari batik usang, kadang pula batik baru yang diusang-usangkan. Pakaian macam ini mahal harganya, saya yang pegawai negeri golongan tiga tidak mampu bayar waktu istri saya minta dibelikan. Model pakaian ini dapat dilihat sebagai ekspresi ingatan orang bahwa sebelum makmur seperti sekarang dulu mereka pernah miskin; sebagai pernyataan simbolik bahwa kaum makmur baru ini tidak lupa dengan akar sejarahnya.

Sudah beberapa tahun orang di Jogja pada gila dengan konsep makan lesehan, makan di atas tikar yang dihampar di atas trotoar di tepi jalan. Mahasiswa makan lesehan, wisatawan makan lesehan. Belum ke Jogja kalau belum makan lesehan. Jaman dulu lesehan ini adalah gaya makan petani yang tidak kuasa membeli meja kursi untuk makan. Keluarga priyayi dan juragan selalu makan di meja makan. Konon kabarnya, saat perang kemerdekaan dan untuk beberapa tahun Jogja menjadi ibukota republik, sejumlah ibu mencoba meraih peluang dengan membuka warung tanpa meja

kursi di trotoar depan Pasar Bering dan Malioboro melayani keperluan makan para prajurit dan pejuang. Lesehan di Jogja adalah ekspresi ingatan tentang jaman miskin dan susah yang dipelihara dan dioperasikan di saat orang tidak lagi miskin dan secara ekonomi tidak susah. Harap periksa, harga sajian di lesehan trotoar Jogja tidak lebih murah daripada harga di rumah makan. Kemiskinan sekarang tinggal sebagai masa lalu, yang dikomodifikasi dengan cara dihadirkan sebagai kenangan romantis.

Selain gaya hidup berlebih seperti saya singgung sedikit di atas, peningkatan ekonomi juga dihindangi oleh persoalan mendasar yang sungguh rumit, yakni pelebaran kesenjangan antara kaum yang makmur dan tidak makmur. Bahwa peningkatan *gross domestic product* secara agregat pada tingkat nasional maupun rata-rata per kapita ternyata tidak terdistribusikan dengan merata di antara seluruh warga negeri. Dengan kata lain, kehidupan ekonomi yang kian makmur ini, ternyata juga kian timpang. Penghitungan rasio Gini, angka 0 mengunjuk pada pada persebaran merata sempurna, 1 mengunjuk pada ketimpangan total, pada tahun 1984 menghasilkan angka 30.5, setelah mengalami penurunan ke angka 29.2 pada tahun 1990 angka ini terus naik hingga mencapai 35.6 pada tahun 2015.

Tabel 2. Indeks Gini Indonesia 1984–2015

Tahun	Indeks Gini	Tahun	Indeks Gini
1984	30.5	1999	29
1987	29.3	2002	29.7
1990	29.2	2005	34
1993	29.3	2008	34.1
1996	31.3	2010	35.6

Sumber: Bank Dunia

Penghitungan antar tahun di atas mengindikasikan bahwa belakangan hari ini, makin lama kehidupan kita semakin timpang. Pelebaran jurang ekonomi ini tidaklah seperti yang dinyanyikan oleh Oma Irama tahun 1970an dahulu, “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.” Kemiskinan di Indonesia masih tetap ada, namun intensitasnya tidak lagi segelap masa lalu dimana orang bisa mati kelaparan dalam jumlah ratusan.

Sekarang sebelum orang mati kurang pangan sudah ada jatah beras dari Pemerintah—yang akan lebih elok kalau disebut beras makmur daripada beras miskin. Sekarang sebelum orang mati sakit karena tiada pertolongan, sudah ada BPJS; dan seterusnya. Ketimpangan ekonomi sekarang adalah orang yang miskin menjadi tidak lagi miskin-miskin amat. Mereka bisa makan, bisa kirim anak ke sekolah hingga SMA, kalau sakit dapat pula berobat. Akan tetapi di kutub yang lain, orang yang kaya menjadi semakin kaya hingga ke tingkat yang tidak bisa dibayangkan. Menurut daftar majalah Forbes, orang terkaya di Indonesia memiliki asset ekonomi senilai 15,4 milyar dolar Amerika; orang terkaya urutan ke 50 memiliki asset sebesar 400 juta dolar. Berapa itu 400 juta dolar dalam rupiah? Kira-kira ya 5 trilyun rupiah. Berapa banyak uang 5 trilyun? Wahhhhh ... mungkin kalau pakai uang lembaran sepuluh ribu rupiah ditumpuk ya bisa sampai ke rembulan sana. Uang ini kalau didiamkan saja di bank akan menghasilkan bunga tidak kurang dari 1,2 trilyun per tahun alias 100 milyar per bulan, atau 3,3 milyar per hari. Bagaimana rasa ketimpangan ekonomi ini? Kalau gaji dosen rata-rata adalah 8 juta per bulan, maka sepanjang karir 40 tahun paling banter hanya akan terkumpul 4.8 milyar. Gaji dosen sepanjang karir, setara dengan penerimaan satu setengah hari orang terkaya urutan ke 50 di Indonesia. Nah... silahkan dibayangkan betapa pahit jurang sosial-ekonomi ini.

Untuk sementara ini saya hanya bisa menduga-duga konsekuensi dari melebarnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kehidupan ekonomi secara langsung berkait dengan kehidupan sosial, dalam banyak hal kedua hal ini merupakan satu jalinan yang tidak bisa dipisahkan sehingga muncul konsep sosial-ekonomi. Dalam dugaan saya, terentangnya ekonomi masyarakat menjadi dua kutub yang sangat kaya dan yang biasa-biasa saja telah membuat relasi sosial masyarakat Indonesia mulai mengalami disintegrasi. Orang tidak lagi mengidentifikasi diri dengan masyarakat, dan lebih berorientasi kepada diri mereka sendiri; seperti penumpang kapal yang pecah "*Every man for himself*". Semua orang sibuk mengurus diri masing-masing, *lu lu gue gue* kata orang Jakarta; orang lain tidak penting, akulah yang penting. Manusia menjadi egosentrik. Saya menyaksikan di berbagai tempat orang sekarang memakai hape yang kemudian naik derajat menjadi telpon cerdas, dunia ada dalam genggam tangan—katanya. Nah, namun ya di Indonesia ini saya menyaksikan orang seperti mengalami kegilaan mengambil potret diri—selfi. Dulu orang memotret dunia luar, pemandangan dan orang lain. Sekarang orang memotret diri sendiri. Pergi ke pasar selfi,

ke mall selfi, ke kampus selfi, ikut konferensi selfi ... pergi umroh selfi. Saya menduga-duga, ada kemungkinan kegilaan selfi ini adalah indikasi nyata dari suatu keadaan sosial dimana orang tidak lagi menganggap masyarakat/ orang lain sebagai hal penting; atau kalah penting dengan diri sendiri.

Bagaimana kita bisa memahami perpecahan ekonomi ini ini? Sepertinya teori-teori status quo tidak bisa dipakai untuk membangun pemahaman yang memuaskan. Penjelasan yang ditawarkan oleh Adam Smith (1776) bahwa kehidupan ekonomi akan diatur, diseimbangkan oleh tangan-tangan pasar tidak kentara tidak terbukti di sini. Orang-orang yang menempati posisi terkaya di Indonesia adalah mereka yang bergerak di dunia bisnis, bukan birokrasi. Mereka percaya pada prinsip ekonomi pasar bebas, menjalankan prinsip tersebut sehebat-hebatnya. Hasilnya ternyata bukannya keseimbangan dan pemerataan tetapi malah kesenjangan. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau (1762) mengenai kesepakatan sosial juga sukar dioperasikan untuk memahami keadaan ini. Ketimpangan, seperti halnya penyingkiran dan peminggiran, bukanlah hasil kesepakatan sosial tetapi akibat proses-proses supra-organik yang berlangsung di luar kendali individu manusia.

Thomas Hobbes(1651), menyarankan kita untuk melihat bahwa dunia sosialpada dasarnya adalah arena kompetisi habis-habisan dan relasi antar manusia adalah relasi konflik, "*the war of all against all*". Tatanan sosial, mengikuti pandangan ini, adalah konsekuensi dari gerak mempertahankan kepentingan diri individu satu terhadap yang lain, melalui proses kerjasama, akomodasi dan gesekan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Prinsip Perdana Menteri Benjamin Disraeli, "kita tidak punya musuh abadi, tidak juga punya kawan abadi. Kita hanya punya kepentingan abadi" berlaku di sini. Dinamika sosial yang berlangsung tidak terjadi pada tingkat kelas, tetapi individu atau unit-unit kecil individu yang sifatnya *mawur*, mudah terbentuk dan terbongkar seperti segenggam pasir mengikuti kepentingan masing-masing. Kelas sosial bukanlah posisi permanen, juga bukan kelompok baku karena individu terus mengalami mobilitas sosial naik maupun turun. Demikian pula ikatan sosial yang lain seperti unit tempat tinggal, apalagi unit kerja. Ideal moral mengajar kita untuk melihat kekerabatan sebagai satuan sosial yang kokoh, namun fakta sejarah menunjukkan bagaimana dari negeri ke negeri setiap jaman terus dipenuhi ceritera baku hantam, baku remuk, baku bunuh abang adik, paman kemenakan, ayah anak, apalagi suami isteri. Kesaksian Walmiki dalam

Ramayana, kesaksian Viyasa dalam Mahabarata bukanlah semata-mata narasi adu moral benar salah namun lebih merupakan perkara penyesuaian kepentingan pribadi. Konsep Marx mengenai perjuangan kelas tidak valid di sini, karena kelas sebagai satuan sosial permanen tidak ada. Orang terus bergerak dalam rangka naik kelas, orang juga berupaya dan lebih banyak yang gagal supaya tidak jatuh kelas sebagai korban gravitasi ekonomi politik. Menang kalah seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh posisi kelas tetapi lebih oleh kualitas dan kuantitas kekuatan individual seperti dalam pepatah Jawa *kebo gedhe menang berike, asu gedhe menang kerahe*; kerbau besar menang berantemnya, anjing besar menang kelahinya.

Kepentingan yang dikedepankan oleh manusia utamanya berkait dengan akses terhadap sumberdaya primer penghasil materi dan jasa pemenuh hajat dasar; pangan, sandang, ruang hidup. Dalam perjalanannya, oleh transformasi besar ekonomi seperti yang diteorikan oleh Karl Polanyi (1944) sumberdaya primer tersebut mengalami alih rupa menjadi uang dan pasar yang berdiri sendiri dan lepas dari control sosial. Orang berantem berebut uang dan pasar. Nyaris secara naluriah orang terdorong untuk menguasai akses yang aman terhadap sumberdaya primer; makin aman makin baik. Aman di sini menyangkut kuantitas, makin besar makin baik; kualitas, makin produktif makin baik; dan eksklusivitas, makin tidak terganggu oleh orang lain makin baik.

Dalam perjalanan sejarah mekanisme untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya primer mengalami perkembangan yang sangat mendasar, mulai dari akumulasi primitif, penghisapan nilai lebih, *adverse incorporation*, perengkuan merugi, dan belakangan ini berkembang *voluntary self-drudgery*, pemerasan diri suka rela.

Akumulasi primitif, adalah proses pengumpulan sumberdaya primer di tangan seseorang dengan cara merebut dari orang lain serta menegakkan klaim kepemilikan eksklusif melalui cara militer, hukum *bodong* yang disusun dan diundangkan tanpa kesepakatan warga negeri atau pula dagang tipu-tipu. Penguasaan tanah pertanian di benua Amerika oleh pendatang dari Eropa merupakan contoh dari proses ini. Demikian pula pendirian perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda pada abad ke 19 dan beberapa anak cucunya di Indonesia dan Asia Tenggara abad ke 20 (Hirsch, Li dan Hall, 2011). Ketika tanah sebagai komponen produksi utama makin sulit untuk direbut dengan semena-mena, baik karena peraturan demokrasi maupun karena tanahnya memang dipegang erat-erat oleh para petani, akumulasi akses terhadap sumberdaya—di sektor pertanian—dilakukan

dengan mekanisme perengkuan merugi. Petani diajak kerja sama oleh perusahaan untuk menanam jenis komoditi tertentu namun hasil yang didapat dari kerja tersebut lebih banyak dinikmati oleh perusahaan, sementara risiko usaha lebih banyak ditanggung petani. Program perkebunan inti rakyat, tebu rakyat intensifikasi, program anak angkat peternak ayam, kredit usaha mikro dan kecil bisa ditampilkan sebagai contoh dari mekanisme ini. Demikian pula dengan keputusan sukarela petani bebas untuk menanam komoditi pasar dunia. Dengan inisiatif sendiri mereka menggabungkan diri dengan ekonomi pasar namun berada pada posisi ekonomi yang sangat rentan seperti nasib para petani di Pegunungan Sulawesi Tengah yang diuraikan Tania Li (2014).

Di sektor industri dan jasa, yang digerakkan oleh tenaga kerja limpa yang tidak lagi bisa diserap oleh sektor pertanian akumulasi akses terhadap sumberdaya primer—bentuknya adalah uang dan alat-alat produksi non tanah—dicapai melalui pengambil alihan penghasilan yang semestinya milik pekerja oleh pengusaha. Praktik ekstraksi yang semula berjalan mulus ini lama kelamaan berhadapan dengan sedikitnya dua hambatan. Pertama, hambatan yang tidak terlalu efektif dari Pemerintah dalam bentuk peraturan mengenai upah minimum. Kedua, hambatan sangat efektif dari dalam tubuh sistem industri itu sendiri yakni penggunaan mesin dalam rangka peningkatan efisiensi dan menjaga tingkat keuntungan. Hambatan internal ini melahirkan perkara pahit yang disalut dengan istilah akademis rasionalisasi dan *out sourcing*; atau pehaka, dan buruh lepas dalam bahasa mentahnya. Dalam sejumlah kasus agar lebih mudah ditelan oleh korbannya, *pehaka* diberi pemanis menjadi pensiun dini.

Peningkatan efisiensi, melalui mekanisasi, dalam sektor pertanian dan industri melahirkan anak yang dikehendaki bernama produksi berlimpah dan anak tidak dikehendaki bernama bala pekerjacadangan; *labour surplus army* yang jumlahnya cenderung kian membesar sejalan dengan makin gencarnya efisiensi usaha. Pasti ada Ibu Bapak yang berkata bala cadangan pekerja hanyalah eufimisme dari penganggur, benar juga. Bala cadangan ini ada, hidup dan butuh makan, sandang, papan dan seterusnya, namun tidak ada lapangan kerja tersedia dan karenanya tidak ada UMR yang melindungi mereka. Kepada siapa mereka minta tolong? Sektor swasta membuang dan menolak mereka. Bagaimana kalau minta tolong kepada negara? Mohon ampun, belakangan ini negara, undang-undang dan segala perangkatnya kalah oleh kehendak—pemilik dan dinamika—swasta. Uni Eropa, WTO dan AFTA, dan sebentar lagi Masyarakat ASEAN bisa ditampilkan sebagai

bukti. Di Eropa, pajak, tapal batas, tentara, subsidi warganegara yang merupakan daulat negara dilebur, dihilangkan, diubah oleh satu badan supranegara Uni Eropa atas nama efisiensi ekonomi—untuk memuluskan pergerakan barang, jasa, tenaga kerja, dan kapital sehingga biaya dapat ditekan serendah mungkin supaya produktivitas dan profit tetap tinggi. Jadi mohon ampun saja, tampaknya negara sudah tekuk lutut dihadapan kekuatan sektor swasta dengan keperkasaan modal dan adidaya produksinya. Selamat datang di Jaman Neo-liberal.

Lantas, kembali kepada pertanyaan di atas, kepada siapa bala cadangan yang telunta-lunta ini minta tolong? Tidak bisa minta bantuan kepada orang tua yang melahirkan dan membuang mereka, bala cadangan pekerja ini berupaya menolong diri sendiri dengan membangun kerajaan pemasaran absurd yang elemen intinya adalah memakan dan memeras diri dan kaumnya sendiri, *self drudgery*. Caranya adalah dengan mengolah relasi sosial menjadi jalur ekstraksi ekonomi dalam konsep *multi level direct selling* (MLDS), penjualan langsung banyak tingkat, MLM dalam bahasa sehari-harinya.

Dalam MLDS orang tidak menjual produk melimpah riil yang sudah ada; sepeda motor, mobil, PC, celana jin misalnya; tetapi mengedarkan produk kreasi baru yang agak-agak kental bau gaibnya—tidak penting apa isinya yang penting percaya. Produk ini nilai gunanya tidak pernah jelas, ya karena bau-bau gaib tadi, makanan suplemen, makanan herbal, obat alami, benda mustika dan seterusnya; namun nilai tukarnya dimanipulasi agar menjadi tinggi dan secara sosial efektif dipakai sebagai alat untuk memenangkan kepentingan diri mengakumulasi akses terhadap sumberdaya jaman neo-kapital. Bila kita mengoperasikan perspektif antropolog religi, maka MLDS ini akan tampak sebagai religi neo-liberal; yakni gerakan melawan arus politik-ekonomi utama jaman neo-liberal dengan membangun jemaat/ umat eksklusif berbasis pada keyakinan pada hal gaib guna mencapai kepentingan ekonomi tertentu. Sebagaimana layaknya religi beneran, maka MLDS ini juga memiliki ritus, baiat, stratifikasi sosiomoral (yang sebenarnya ekonomi), dan khotbah mengenai dunia melimpah ruah tanpa batas tempat orang bisa meraih segala apa yang dimimpikannya.

MLDS ini cermin obyektif dari dunia material yang terbelah menjadi dua kutub seperti diindikasikan oleh indeks gini di awal pembicaraan. Namun demikian MLDS juga memberi orang keyakinan bahwa mereka bisa mengalami mobilitas sosial naik hingga memasuki dunia melimpah ruah tanpa batas, menjadi pemegang status *diamond* yang tinggal di rumah

megah mewah, kemana-mana naik Jaguar atau Mercedes terbaru, berwisata keliling dunia tanpa ongkos pribadi. Benar-benar sorga dan anggota MLDS meyakinkannya. Seorang kawan sedemikian yakin dengan MLDS ini, sampai dia berani mengangkat “kebenaran MLDS” menjadi tesis. Brosur MLDS tempat dia bergabung, yang dia katakan sebagai tempat melakukan observasi, selalu dia bawa dan tunjukkan setiap kali bimbingan; dia yakin bahwa orang bisa menjadi kaya raya dengan ikut MLDS; walau faktanya setelah bertahun-tahun menjadi anggota; giat mengonsumsi serta sebisa-bisanya mengedarkan komoditi MLDS kepada orang lain yang disebut sebagai *down liner*, tetap saja kondisi ekonominya tidak berubah dari semula. Hanya capek, sakit dan *remek* yang ia alami, namun tetap tidak putus asa; memang seperti ini kan yang namanya religi?

Begini ringkasnya. Dalam MLDS seseorang mendapat hasil berupa persentase dari hasil penjualan suatu produk. Semakin banyak unit produk yang ia pasarkan maka semakin besar pula nilai absolut hasil yang diterimanya. Untuk mencapai angka penjualan yang tinggi maka seorang pemasar atau anggota MLDS didorong untuk merekrut anggota bawahan, atau *down liner* yang masing-masing membawa target penjualan tertentu. Setidaknya di atas kertas, semakin banyak *down liner* seorang pemasar MLDS semakin besar pula unit penjualan yang dia capai. Seorang *downliner* juga ingin meningkatkan omset penjualan, agar dia mendapat hasil absolut yang tinggi, oleh karena itu *down liner* juga disemangati agar mencari *downliner* lagi di bawahnya. Demikian seterusnya. Struktur MLDS tidak ubahnya seperti piramida. Tinggi rendah kedudukan seseorang dalam piramida ditentukan oleh besar jumlah *downlinernya*. Semakin besar jumlah *downliner*, semakin tinggi kedudukannya, semakin besar jumlah produk yang dipasarkan dan semakin besar hasil yang diterima. Mengingat penerimaan seorang pemasar tergantung dari jumlah *downliner* di bawahnya maka suatu piramida MLDS akan berhenti tumbuh dan mendatangkan penghasilan ketika *down liner* baru tidak lagi bisa direkrut. Dalam prinsip ekonomi *cokot-cokotan*, ekonomi orang gigit orang, suatu MLDS akan tumbang ketika orang yang terakhir digigit tidak bisa menggigit orang lain lagi—baik karena sudah tidak ada insentif untuk menggigit atau pula tidak ada lagi subyek yang bisa digigit.

Studi Peter Cahn (2006, 2008) dari pengamatannya di Mexico mengungkapkan bahwa orang berbondong-bondong bergabung dengan kelompok MLDS karena adanya imajinasi menjadi wirausaha yang sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri. MLDS benar-benar merupakan

tafsir ultra modern terhadap ajaran agama “Tuhan tidak akan menolong nasib satu kaum, kecuali kaum tersebut menolong dirinya sendiri.” Peserta MLDS tidak bekerja di bawah perintah orang lain, namun menentukan rencana usahanya sendiri dan prestasi ekonomi yang dicapai sepenuhnya hasil kerja keras diri sendiri. Kesempatan terbuka luas bagi semua orang untuk membangun kerajaan usahanya dan semakin besar jumlah produk komoditi yang dijual semakin besar pula kerajaannya, senyampang dengan itu kian besar juga penghasilan yang diterima. Elan kerja seperti ini adalah semangat khas jaman neoliberal. Kiranya bukan hal kebetulan bahwa MLDS masuk ke Mexico—serta negeri-negeri lain di dunia—pada saat praktek ekonomi neo-liberal mulai diadopsi oleh pemerintah. Di Indonesia peristiwa ini terjadi pada awal pergantian decade 80 ke 90an, yang ditandai dengan dihapuskannya subsidi pemerintah ke sektor pertanian.

Darimana uang yang diterima seorang pemasar MLDS berasal. Uang ini bukan dari nilai tambah, karena sifat produk yang dipasarkan tidak berubah sama sekali mulai dari produsen hingga konsumen. Uang ini juga bukan hasil penghisapan nilai lebih, karena tidak ada kegiatan produksi apapun yang berlangsung dalam MLDS. Hasil pemasar berasal dari selisih biaya produksi barang yang dijual dan harga jual yang dibayar konsumen. Bagaimana suatu produk bisa punya margin hasil besar untuk banyak lapis pemasar? Pertama adalah dengan menekan serendah mungkin atau bahkan menghapus biaya iklan dan *took*; caranya adalah dengan mengoperasikan setiap pemasar sebagai juru iklan sekaligus pelaksana penjualan tanpa melibatkan pelayan. Kedua, dengan membuat produk yang sangat spesifik sehingga tidak bisa ditiru oleh produsen lain guna menghindari persaingan yang akan menurunkan harga. Penciptaan produk tanpa saingan semacam ini dilakukan dengan cara membangun narasi mengenai sifat khas produk sehubungan dengan bahan bakunya atau lokasi sumber bahannya atau lokasi pabrik pembuatannya. Ketiga, menjual produk yang nilai gunanya mendekati nol, sehingga biaya produksi juga sangat rendah, dan kemudian dijual dengan harga tinggi. Cara ini dicapai dengan konstruksi narasi—membuat dongeng—ajaib mengenai khasiat produk yang dijual; baik ajaib secara fisik, punya efek kesehatan yang luar biasa mampu mengobati seribu satu macam penyakit ataupun ajaib secara metafisik alias klenik, kuasa mendatangkan energy positif yang membuat orang selalu merasa bahagia dan sehat; sampai ke kemampuan gaib mengundang rejeki dari sumber yang tiada terduga. Karena produk ini sungguh ajaib maka harganya mahal.

Dalam tinjauan antropologi religi MLDS adalah agama produk; kongregasi yang dibangun dan digerakkan oleh iman kolektif terhadap produk tertentu. Secara sosial, agama ini kuasa menggerakkan orang untuk bertindak dan mencapai keberhasilan ekonomi bukan karena produk yang mereka jadikan obyek perhatian memiliki nilai guna efektif—mana ada obat untuk 1001 penyakit, mana ada piring mustika pembawa rejeki. Agama produk kuasa menggerakkan orang karena penganutnya percaya kepada efektivitas obyek tersebut. Hal ini tidak ada bedanya kepercayaan orang terhadap totem seperti yang diuraikan oleh Emile Durkheim. Seperti halnya agama lain. Agar seorang pemasar MLDS bisa membatui orang lain sebagai pemasar bawahannya, maka ia juga harus menunjukkan keimanannya dengan cara menjadi konsumen setia kalau bukan fanatic atas produk yang dipasarkan. Dalam rangka mendapatkan down liner sebanyak mungkin anggota MLDS harus aktif melakukan rekrutmen. Kecenderungan awalnya adalah mereka akan merekrut, memprospek istilahnya, orang-orang terdekat, saudara, sahabat, kawan, tetangga. Disini relasi sosial yang dibangun di atas ikatan kekerabatan, kesatuan tepat tinggal, kesatuan tempat kerja dan tanggung jawab diubah secara sistematis menjadi jalur ekstraksi ekonomi. Dalam kapitalisme awal, manusia berbondong-bondong memeras sumberdaya alam; dan sekarang dalam era neo-kapital orang memeras relasi sosial agar menjadi duit. Saya tidak tahu apakah Robert Puttnam dan Alejandro Portes sempat membayangkan bagaimana konsep sosialkapital yang mereka agungkan pada praktiknya bisa menjadi jalur pemerasan seperti ini.

Apa yang menjadi bahan dasar pembangunan dan pertumbuhan piramida MLDS? Anggota MLDS diajar untuk membayangkan adalah suatu dunia ekonomi yang terus berkembang tanpa batas. Bayangan ini dibangun diatas asumsi bahwa ada pasokan yang melimpah bala cadangan pekerja yang tak terpekerjakan yang mau direkrut sebagai down liner baru—untuk kemudian merekrut orang lain lagi sebagai *downliner* mereka. Bala cadangan pekerja memang melimpah, namun bukan tidak tak terbatas. Hal yang biasa terjadi adalah sebelum semua bala cadangan ini direkrut sebagai *down liner* suatu piramida MLDS sudah mencapai titik maksimal pertumbuhan dan mati. Saat itu terjadi ketika margin hasil yang ada pada produk yang dipasarkan sudah habis dibagi oleh lapis pemasar yang ada sehingga downliner baru tidak mendapatkan margin hasil apapun—tidak peduli betapa fanatiknya dia mengonsumsi produk yang dipasarkan.

Pada saat suatu piramida MLDS mati biasanya para pimpinan, pemegang gelar diamond atau yang lebih tinggi lagi, membuka MLDS baru dengan produk yang berbeda lagi. Demikian siklus kehidupan MLDS diulang lagi. Probabilitas statistiknya adalah pengulangan siklus hidup MLDS akan membuat para petinggi MLDS tetap sebagai petinggi yang kian besar aksesnya terhadap sumberdaya neo-kapital: uang. Sementara *downliner* terakhir tetap saja tidak banyak beranjak dari kedudukannya semula, sebagai orang lapis bawah paling bawah. Kira-kira demikianlah pelebaran jurang sosial ekonomi dalam era neo-kapital neo-liberal diciptakan.

Para Guru Besar, Ibu, Bapak, Ito, Amang... mohon ampun bahwa dalam orasi ini saya melihat dunia cenderung hanya dari sisi orang kalah saja. Ilmu sosial dan humaniora bukan disiplin pengetahuan yang netral, bebas nilai. Disadari atau tidak, para ilmuwan sosial dan humaniora semua memihak. Kerja akademik saya memihak, dan saya memilih untuk memihak, atau setidaknya memandangi dunia, dari sudut pandang kaum yang *keok* dan tertinggal. Orang yang menang, makmur dan melimpah mampu mengurus diri mereka sendiri; rakyat jelata yang terhempas dan terputus, meminjam istilah Chairil Anwar, itulah yang perlu dukungan.

Mohon ampun apabila ada salah kata, salah konsep yang tidak berkenan dalam hati dan pertimbangan Inang dan Amang sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam orasi ini ada manfaatnya bagi kerja akademik kita semua.

Terima kasih. Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.